

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika perekonomian dunia, khususnya pada sektor keuangan dan mekanisme pembayaran. Kemajuan teknologi mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi berbasis tunai ke layanan pembayaran digital yang dinilai lebih mudah, cepat, dan mendukung efisiensi aktivitas ekonomi. Menurut *Bank for International Settlements*, penerapan digitalisasi dalam sistem pembayaran memiliki peran penting dalam memperbaiki efektivitas proses transaksi, sekaligus memberikan pengaruh terhadap jumlah uang yang beredar dan arah kebijakan moneter dalam suatu perekonomian (Bank for International Settlement, 2023).

Perkembangan digitalisasi sistem pembayaran juga terjadi secara signifikan di Indonesia. Sejak beberapa tahun terakhir, khususnya setelah pandemi Covid-19, masyarakat semakin terbiasa menggunakan instrumen pembayaran digital dalam kegiatan ekonomi sehari-hari (Maharani *et al.*, 2023). Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi non-tunai terus meningkat, baik melalui uang elektronik maupun layanan perbankan digital (Siregar, Hutagalung dan Nduru, 2025). Kebijakan Bank Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) sejalan dengan upaya menciptakan mekanisme pembayaran yang aman, efisien, dan dapat diakses secara menyeluruh oleh seluruh masyarakat (Bank Indonesia, 2025).

Salah satu bentuk digitalisasi sistem pembayaran yang berkembang pesat adalah uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik merupakan alat pembayaran prabayar yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi tanpa

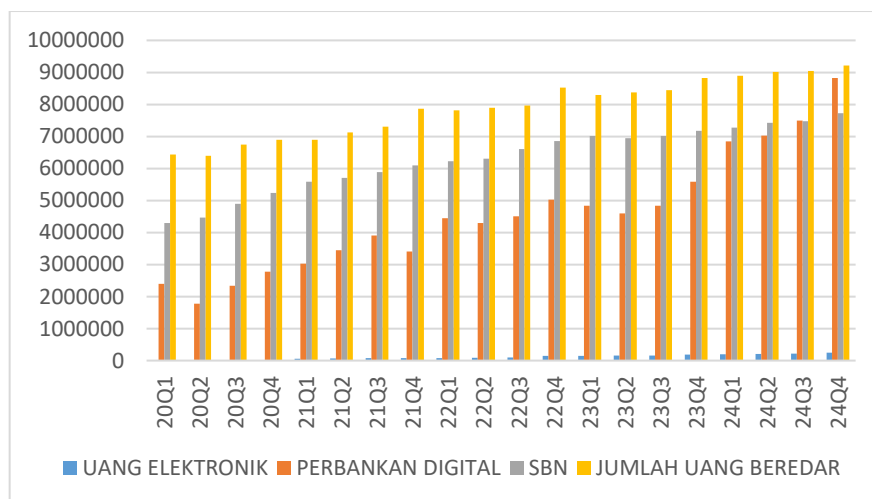
menggunakan uang tunai. Peningkatan transaksi uang elektronik menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat dalam memegang dan menggunakan uang (Hasyim *et al.*, 2023). Dari sisi moneter, peningkatan penggunaan uang elektronik dapat mengurangi penggunaan uang kartal dan mendorong peredaran uang dalam bentuk simpanan di sistem keuangan (Yulistianingsih dan Badar, 2023). Perkembangan sistem pembayaran digital memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap permintaan uang serta kecepatan sirkulasi uang dalam perekonomian. Dengan semakin meluasnya pemanfaatan uang elektronik dan platform digital, perubahan dalam pola transaksi tersebut turut memengaruhi aliran uang di tengah masyarakat (Badrawani *et al.*, 2024).

Selain penggunaan uang elektronik, perbankan digital menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Layanan ini memanfaatkan teknologi oleh bank untuk menyelenggarakan berbagai layanan dan prosedur perbankan secara elektronik, sehingga nasabah dapat bertransaksi lebih mudah dan tetap terpenuhi kebutuhannya tanpa interaksi langsung (Wibowo, 2022). Fasilitas seperti mobile banking dan internet banking memungkinkan masyarakat melakukan transaksi keuangan secara cepat dan efisien tanpa harus mengunjungi kantor bank. Kemudahan ini mendorong peningkatan frekuensi dan volume transaksi, sekaligus memperbesar potensi dana masyarakat agar lebih luas beredar dan tersimpan dalam sistem perbankan. Akibatnya, kondisi tersebut memperkuat likuiditas ekonomi serta memengaruhi jumlah uang beredar dalam arti yang lebih luas (Zulfa, Syahnur dan Suriani, 2023). Penelitian oleh Wulandari, Farrohah dan Sumriyah (2023) turut menegaskan bahwa kemajuan perbankan digital memberikan kontribusi terhadap efisiensi sistem pembayaran dan mendukung stabilitas moneter.

Selain digitalisasi sistem pembayaran, faktor lain yang memengaruhi pergerakan jumlah uang beredar adalah Surat Berharga Negara (SBN). Instrumen ini digunakan oleh pemerintah sebagai sarana pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sekaligus mengelola utang negara (Wulandari, Farroah dan Sumriyah, 2023). Peningkatan *outstanding* Surat Berharga Negara dapat berdampak pada likuiditas perekonomian, tergantung pada pihak yang membeli instrumen tersebut. Apabila Surat Berharga Negara dibeli oleh perbankan atau masyarakat, maka dana akan terserap sehingga likuiditas berkurang. Sebaliknya, jika dibeli oleh bank sentral, maka jumlah uang beredar dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Berharga Negara memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika jumlah uang beredar (Lubis, Siregar dan Rahmarisa, 2025).

Gambar 1. 1

Pembayaran Digital, SBN dan Jumlah Uang Beredar



Sumber : Bank Indonesia, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, selama periode tahun 2021 hingga 2024 (kuartal I–IV), pembayaran digital yang terdiri dari uang elektronik dan perbankan digital menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada awal periode tahun 2021, nilai

transaksi kedua instrumen tersebut masih relatif rendah, namun mengalami peningkatan bertahap pada setiap kuartal. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital oleh masyarakat serta adanya pergeseran dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai (Farida *et al.*, 2023).

Perkembangan yang sama juga terlihat pada *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN) yang terus menunjukkan tren peningkatan sepanjang periode 2021 hingga 2024. *Outstanding* SBN mencerminkan nilai nominal SBN yang masih beredar dalam suatu periode karena belum jatuh tempo atau belum dilunasi (Hamzah, 2023). Tren kenaikan ini semakin menguat pada kurun 2022 sampai 2024, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi. Peningkatan SBN tersebut turut memengaruhi likuiditas perekonomian karena dapat menyerap maupun menambah jumlah uang beredar, bergantung pada pihak yang membeli instrumen tersebut (Kesumadewi, Aprilyani dan Nurcahya, 2024).

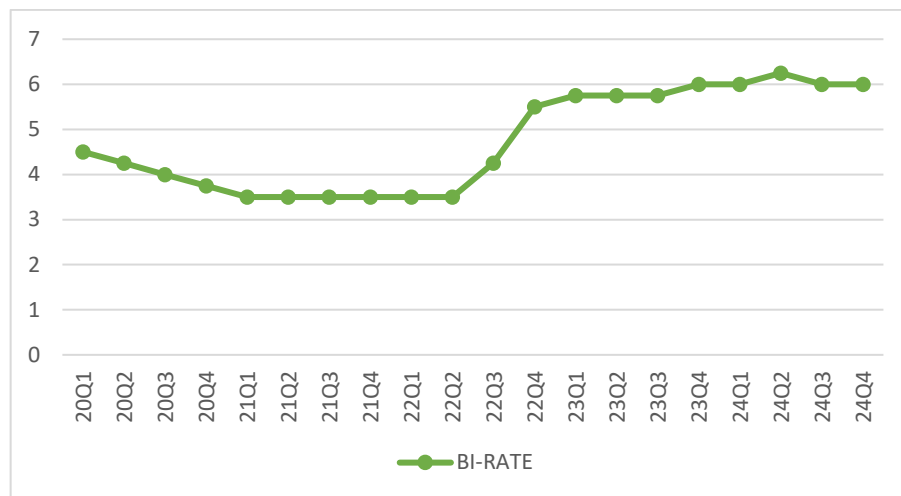
Seiring dengan meningkatnya penggunaan pembayaran digital dan bertambahnya *outstanding* SBN, jumlah uang beredar selama kuartal I 2021 hingga kuartal IV 2024 juga cenderung naik. *Broad money* dipahami sebagai indikator uang beredar dalam arti luas yang mencerminkan total likuiditas dalam perekonomian. Di Indonesia, ukuran ini diwakili oleh agregat moneter M2, yang terdiri dari M1 termasuk uang kartal dan giral ditambah uang kuasi seperti tabungan, deposito berjangka, serta surat berharga non-saham yang diterbitkan oleh lembaga perbankan (Harjunawati dan Addin, 2023). Meski demikian, laju pertumbuhan *broad money* terlihat lebih stabil dibandingkan pertumbuhan transaksi pembayaran digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kenaikan transaksi digital

tidak selalu diikuti oleh peningkatan jumlah uang beredar dalam proporsi yang sama. Dengan demikian, terdapat dinamika yang saling berkaitan antara perkembangan pembayaran digital, ekspansi SBN, dan kondisi likuiditas dalam perekonomian (Emilda, Nurkholis dan Putri, 2024).

Selain kebijakan fiskal melalui SBN, kebijakan moneter melalui suku bunga BI-Rate juga berperan penting dalam mengendalikan likuiditas perekonomian. BI-Rate digunakan oleh Bank Indonesia menjadi instrumen untuk mengarahkan tingkat suku bunga perbankan dan mengendalikan inflasi (Sitorus *et al.*, 2024). Perubahan BI-Rate dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam memegang uang atau menyimpannya dalam bentuk tabungan dan investasi. Berdasarkan teori preferensi likuiditas Keynes, terdapat keterkaitan yang kuat antara tingkat suku bunga dan permintaan uang, di mana kenaikan suku bunga cenderung menurunkan permintaan uang dan sebaliknya (Keynes, 1936).

Kebijakan suku bunga Bank Indonesia memengaruhi tingkat transaksi digital dan jumlah uang beredar. Tingkat suku bunga yang rendah cenderung merangsang kegiatan konsumsi dan investasi, yang meningkatkan transaksi digital, sementara suku bunga tinggi cenderung menahan konsumsi dan memperlambat pertumbuhan transaksi digital (Naibaho, Hodijah dan Bahri, 2023). Dengan demikian, suku bunga, transaksi digital, dan uang beredar saling berinteraksi dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Gambar 1. 2
BI-Rate



Sumber : Bank Indonesia, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan Gambar 1.2 BI Rate menunjukkan dinamika yang cukup jelas sepanjang periode 2021 hingga 2024 pada kuartal I sampai IV. Suku bunga BI-Rate adalah tingkat suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, digunakan sebagai panduan utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter untuk menjaga kestabilan nilai tukar (Steven *et al.*, 2022). Sepanjang tahun 2021 hingga awal 2022, suku bunga ini berada pada level yang relatif rendah dan stabil. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga likuiditas serta mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi. Memasuki pertengahan 2022 hingga 2023, BI Rate mulai meningkat secara bertahap. Kenaikan ini muncul sebagai respons atas tekanan inflasi yang semakin kuat dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global (Hasanah, 2023).

Pada tahun 2024, BI-Rate cenderung bergerak stabil pada level yang relatif lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan BI-Rate tersebut memiliki keterkaitan erat dengan dinamika jumlah uang beredar karena perubahan tingkat suku bunga kebijakan dapat memengaruhi pilihan masyarakat dalam

menyimpan dana, melakukan tabungan, maupun menyalurkannya ke instrumen investasi (Laksono, Mulyawan dan Yusuf, 2023). Oleh karena itu, perkembangan BI-Rate menjadi faktor penting yang perlu dianalisis bersama dengan pembayaran digital dan *outstanding* SBN dalam menjelaskan dinamika jumlah uang beredar (*Broad Money*) di Indonesia.

Jumlah uang beredar dalam arti luas (*Broad Money*) termasuk indikator penting analisis moneter karena mencerminkan tingkat likuiditas perekonomian yang mencakup uang kartal, uang giral, tabungan, dan simpanan berjangka (Simanungkalit *et al.*, 2025). Sejak beberapa tahun belakangan, volume kegiatan keuangan berbasis digital di Indonesia meningkat dengan cepat, sementara pertumbuhan jumlah uang beredar menunjukkan dinamika yang relatif berbeda. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengaruh digitalisasi sistem pembayaran, peningkatan posisi *outstanding* SBN, dan kebijakan suku bunga terhadap jumlah uang beredar (Norlaila dan Anward, 2023).

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, digitalisasi sistem pembayaran secara ideal dipahami tidak hanya sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme yang berpotensi mendukung stabilitas moneter melalui peningkatan efisiensi sistem pembayaran, perluasan inklusi keuangan, serta penguatan transmisi kebijakan moneter. Dalam analisis moneter, stabilitas moneter tersebut berkaitan erat dengan kondisi likuiditas perekonomian yang direpresentasikan oleh jumlah uang beredar dalam arti luas (*Broad Money*), mencakup uang kartal, uang giral, tabungan, dan simpanan berjangka (Simanungkalit *et al.*, 2025). Selanjutnya, teori preferensi likuiditas yang dikemukakan oleh Keynes menjelaskan bahwa permintaan uang

terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga, saat terjadi kenaikan suku bunga cenderung menurunkan permintaan uang dan sebaliknya (Keynes, 1936). Oleh karena itu, secara konseptual, perubahan pola transaksi yang dipicu oleh meningkatnya penggunaan pembayaran digital, khususnya apabila berlangsung bersamaan dengan dinamika suku bunga kebijakan, berpotensi memengaruhi likuiditas perekonomian serta perkembangan jumlah uang beredar.

Namun, kenyataannya dinamika di lapangan menunjukkan bahwa keterkaitan antara inovasi pembayaran, perilaku masyarakat, dan likuiditas perekonomian tidak selalu berlangsung secara linier. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran prabayar semakin meluas seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kemudahan dan kecepatan transaksi, yang pada gilirannya mendorong pergeseran perilaku dari penggunaan uang tunai menuju transaksi non-tunai (Hasyim *et al.*, 2023). Dari sisi moneter, peningkatan penggunaan uang elektronik tersebut cenderung diikuti oleh penurunan penggunaan uang kartal serta pengalihan dana ke dalam simpanan pada sistem keuangan formal (Yulistianingsih dan Badar, 2023). pemanfaatan fasilitas bank berbasis elektronik, baik melalui aplikasi perbankan seluler maupun layanan bank berbasis internet, terlihat dari semakin seringnya masyarakat melakukan aktivitas finansial serta bertambahnya nilai transaksi yang dilakukan. Kondisi tersebut meningkatkan peluang dana publik untuk bergerak dan mengendap di lembaga perbankan, sehingga berdampak pada perubahan agregat moneter (Zulfa, Syahnur dan Suriani, 2023). Sejalan akan hal tersebut, Wulandari, Farrohah dan Sumriyah (2023) menyatakan bahwa perkembangan perbankan digital berkontribusi pada efisiensi sistem pembayaran dan mendukung stabilitas moneter. Meskipun demikian, bukti empiris

menunjukkan bahwa peningkatan transaksi digital tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan *Broad Money* dalam proporsi yang sama, karena dipengaruhi oleh perbedaan kecepatan perputaran uang serta perubahan komposisi uang yang dipegang masyarakat, sehingga dampak digitalisasi pembayaran terhadap likuiditas perekonomian bersifat dinamis dan tidak selalu searah (Badrawani *et al.*, 2024).

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum jelasnya bagaimana perubahan sistem pembayaran digital, peningkatan *outstanding* SBN, dan perubahan BI-Rate secara bersama-sama memengaruhi jumlah uang beredar di Indonesia. Di satu sisi, perkembangan uang elektronik dan perbankan digital menunjukkan adanya pergeseran perilaku masyarakat dari transaksi tunai menuju transaksi non-tunai. Di sisi lain, peningkatan SBN dapat menyerap dana masyarakat ke dalam instrumen investasi pemerintah, sedangkan BI-Rate memengaruhi keputusan masyarakat dalam memegang uang, menabung, atau berinvestasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan penting karena perubahan pada ketiga aspek tersebut dapat memengaruhi likuiditas perekonomian melalui mekanisme yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perkembangan pembayaran digital, instrumen fiskal, dan kebijakan moneter benar-benar memengaruhi jumlah uang beredar, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Sejalan dengan perubahan likuiditas dalam perekonomian, sejumlah studi sebelumnya telah membahas berbagai determinan yang berkaitan dengan pergerakan agregat moneter di Indonesia. Namun, pembahasan tersebut umumnya masih berfokus pada pendekatan makroekonomi konvensional. Di sisi lain, penelitian yang menelaah secara bersamaan keterkaitan antara uang elektronik,

layanan perbankan digital, instrumen SBN, dan BI-Rate dengan Broad Money atau M2 belum banyak ditemukan, terutama pada masa meningkatnya digitalisasi sistem pembayaran. Penelitian Badrawani *et al.* (2024) menunjukkan bahwa semakin luasnya pemanfaatan platform transaksi digital berkaitan dengan perubahan arus dana serta percepatan sirkulasi uang dalam perekonomian. Sementara itu, Zulfa, Syahnur dan Suriani (2023) menunjukkan bahwa layanan perbankan digital dapat memperkuat likuiditas melalui peningkatan aktivitas transaksi dan dana yang tersimpan di perbankan. Dari sisi kebijakan fiskal, Lubis, Siregar dan Rahmarisa (2025) menegaskan keterkaitan *outstanding* SBN dengan dinamika jumlah uang beredar melalui mekanisme penyerapan atau penambahan likuiditas. Selain itu, Laksono, Mulyawan dan Yusuf (2023) menyoroti keterkaitan suku bunga kebijakan dengan keputusan masyarakat dalam memegang uang, menabung, dan berinvestasi yang kemudian memengaruhi jumlah uang beredar. Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki peran, meskipun hasilnya dapat berbeda bergantung pada periode pengamatan dan kombinasi variabel yang dianalisis.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa kajian mengenai jumlah uang beredar di Indonesia masih cenderung mengkaji faktor-faktor penentunya secara terpisah. Penelitian umumnya menelaah pengaruh variabel makroekonomi konvensional maupun perkembangan sistem pembayaran digital secara parsial. Oleh karena itu, penelitian yang menganalisis pengaruh uang elektronik, perbankan digital, *outstanding* Surat Berharga Negara, dan BI-Rate secara simultan terhadap jumlah uang beredar (*Broad Money*) masih terbatas, khususnya pada periode percepatan digitalisasi sistem pembayaran pasca

pandemi. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang dapat diisi melalui pengintegrasian indikator digitalisasi pembayaran dengan instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam satu kerangka analisis.

Keterbaruan penelitian ini terletak pada analisis simultan pengaruh transaksi uang elektronik dan perbankan digital, instrumen kebijakan fiskal berupa outstanding SBN, serta kebijakan moneter melalui BI-Rate terhadap *Broad Money*, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Penelitian ini menerapkan analisis berbasis kuantitatif melalui metode *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk menilai hubungan keseimbangan pada periode panjang serta proses koreksi ketidakseimbangan dalam jangka pendek di antara variabel yang dianalisis. Penelitian ini memilih periode Januari 2020 sampai Desember 2024 karena periode ini menangkap perubahan perilaku transaksi sejak awal pandemi dan percepatan penggunaan pembayaran digital. Periode ini juga memuat dinamika pembiayaan pemerintah melalui SBN pada fase pemulihan ekonomi, serta perubahan arah kebijakan BI-Rate dari fase longgar menuju pengetatan dan stabilisasi. Rentang lima tahun memberi data bulanan yang memadai untuk estimasi VECM dan pengujian kointegrasi, dengan batas akhir Desember 2024 juga menjaga konsistensi data yang sudah lengkap. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi empiris untuk menjelaskan interaksi digitalisasi pembayaran, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter dalam memengaruhi dinamika *Broad Money* di Indonesia.

Berdasarkan identifikasi celah penelitian tersebut, penelitian ini penting Negara (SBN), serta kebijakan moneter melalui BI-Rate memiliki keterkaitan dengan pergerakan *Broad Money* di Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai bidang moneter dan sistem

pembayaran, serta dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi pemerintah bersama Bank Indonesia dalam menyusun arah kebijakan yang berorientasi pada terjaganya stabilitas moneter dan ketahanan sistem keuangan nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan sebelumnya, pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Transaksi Uang Elektronik terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Panjang?
2. Bagaimana Pengaruh Transaksi Uang Elektronik terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Pendek?
3. Bagaimana Pengaruh Transaksi Perbankan Digital terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Panjang?
4. Bagaimana Pengaruh Transaksi Perbankan Digital terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Pendek?
5. Bagaimana Pengaruh Surat Berharga Negara terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Panjang?
6. Bagaimana Pengaruh Surat Berharga Negara terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Pendek?
7. Bagaimana Pengaruh BI-Rate terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Panjang?
8. Bagaimana Pengaruh BI-Rate terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Pendek?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengaruh Transaksi Uang Elektronik terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Panjang
2. Menganalisis Pengaruh Transaksi Uang Elektronik terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Pendek
3. Menganalisis Pengaruh Transaksi Perbankan Digital terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Panjang
4. Menganalisis Pengaruh Transaksi Perbankan Digital terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Pendek
5. Menganalisis Pengaruh Surat Berharga Negara terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Panjang
6. Menganalisis Pengaruh Surat Berharga Negara terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Pendek
7. Menganalisis Pengaruh BI-Rate terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Panjang
8. Menganalisis Pengaruh BI-Rate terhadap Jumlah Uang Beredar (*Broad Money*) di Indonesia dalam Jangka Pendek

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini mempunyai batasan pembahasan yang diteliti agar proses penelitian lebih terarah dan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini disusun dengan rancangan kuantitatif dan

menerapkan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) sebagai alat analisis untuk menelaah keterkaitan antarvariabel, baik dalam periode pendek maupun periode panjang. Rentang waktu yang dianalisis mencakup Januari 2020 sampai Desember 2024, dengan total 60 data bulanan. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia serta Kementerian Keuangan. Dalam penelitian ini, agregat moneter M2 atau *Broad Money* ditempatkan sebagai variabel terikat, sedangkan transaksi *e-money*, layanan bank berbasis digital, posisi Surat Berharga Negara yang beredar, dan tingkat BI-Rate digunakan sebagai variabel bebas. Penelitian ini dibatasi pada variabel yang berkaitan dengan digitalisasi sistem pembayaran, instrumen fiskal SBN, dan kebijakan moneter BI-Rate, sehingga tidak mencakup variabel lain seperti kartu debit/kredit, fintech lending, maupun variabel makroekonomi lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang terpadu antara kebijakan moneter, pengembangan sistem pembayaran berbasis digital, dan pengelolaan likuiditas perekonomian. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan dapat mendukung terjaganya stabilitas moneter serta memperkuat efektivitas transmisi kebijakan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pemahaman peneliti mengenai keterkaitan digitalisasi sistem pembayaran, SBN, dan BI-Rate terhadap jumlah uang beredar atau *Broad Money*. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman

dalam analisis data deret waktu menggunakan metode VECM serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang moneter, sistem pembayaran, dan pasar keuangan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami keterkaitan antara perkembangan uang elektronik, layanan perbankan digital, perubahan BI-Rate, dan posisi *outstanding* Surat Berharga Negara terhadap jumlah uang beredar atau *Broad Money*. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk melihat hubungan antara inovasi jasa keuangan, arah kebijakan moneter, dan kondisi likuiditas dalam perekonomian Indonesia.